

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- A Joasis Simon R - Suryano,Thomas, 2011, *Study Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia Lubuk Agung*; Bandung.
- Amiruddin - Asikin,Zainal , 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan keempat*, UII Press, Yogyakarta. 2016.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press.
- Dwi Saputro, Anke, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Jakarta.
- Gibson,James.L., - Ivancevich, John.M., - Donnely, James.H., 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga,Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HS, H. Salim , 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV Ammico, Bandung.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Soegondo Notodisoerjo, 2003, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto ,Soerjono - Sri Mamudji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sulihandari, Hastanti - Rifani, Nisya, 2011, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris , Dunia Cerdas*, Jakarta.

B. Jurnal, Tesis, Makalah

- Sari, Bayu Nirwana, “Pelaksanaan Pembinaan dan Penagwasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang”, *Tesis*, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Tahalele, Juliana Magdalena “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon) “ *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2012
- Mamminanga, Andi, “*Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*”,*Tesis* yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- Moammar Qadhafi “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Notaris yang Berstatus Sebagai Narapidana di Kabupaten Bantul“, *Tesis*,Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.diterjemahkan oleh R.Soesilo, 1980.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten,
29-30 Mei 2015

D. Internet



- Fitri N. Heriani, “ 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus” ,<https://hukumonline.com>. (Diakses pada tanggal 2 Januari 2021)
- Putu Chandra, “Terbukti Lakukan Pemalsuan Dokumen, Notaris Agus Satoto Diganjar 2,5 Tahun Penjara”, <https://bali.tribunnews.com>. (Diakses pada tanggal 2 Maret 2021)
- Nyoman Suarna, “Perintahkan Beri Keterangan Palsu, Notaris Putu Hamirta Dipolisikan” <https://baliexpress.jawapos.com> . (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register perkara nomor 300/Pid.B/2015/PN Dps. (Diakses pada tanggal 4 Maret 2021)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register perkara nomor 641/Pid.B/20205/PN Dps. (Diakses pada tanggal 4 Maret 2021)
- Tri Jata Ayu Pramesti, “ Lingkup Kerja Notaris”, <https://hukumonline.com>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2020)
- Tri Jata Ayu Pramesti, “ Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan”, <https://hukumonline.com>. (Diakses pada tanggal 28 Desember 2020)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PEMBINAAN NOTARIS BERSTATUS SEBAGAI TERPIDANA DI KABUPATEN GIANYAR
DIAH AYU GALIH SARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>